

## BAB V

### KESIMPULAN, SARAN DAN REKOMNDASI

#### A. Kesimpulan

1. Pendidikan umum merupakan program pendidikan yang berupaya membekali individu dengan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan sikap secara integratif agar dapat dipergunakan oleh individu untuk menjalani hidup yang utuh, baik selaku individu, anggota keluarga, anggota masyarakat, maupun selaku warga negara.
2. Landasan filosofis pada kurikulum pendidikan umum jangkauan dan isinya amat luas (integral), yang urutannya disesuaikan berdasarkan pertimbangan yang fundamental pada *human nature* dan pengetahuan ini mensyaratkan pemetaan bidang-bidang makna.
3. Materi pokok yang dijadikan sebagai bahan untuk melaksanakan pendidikan umum adalah materi yang berasal dari bidang-bidang ilmu luas cakupannya, yakni yang mengarah pada pengembangan keterampilan, kemampuan, sikap dan nilai-nilai yang dapat dipergunakannya secara lebih efektif untuk mengatasi persoalan pribadi dan persoalan sosial yang terdapat dalam kehidupannya.

4. Pendekatan yang dipergunakan dalam pendidikan umum bertumpu pada pendekatan bidang pengetahuan dasar, pendekatan disiplin mental, pendekatan minat dan kebutuhan mahasiswa, serta pendekatan seni yang bebas (liberal art).
5. Objek pendidikan umum menjurus pada pemenuhan kehidupan manusia melalui perluasan, penajaman, dan pendalaman makna. Tujuannya adalah untuk mengembangkan manusia seutuhnya, yang terindikasikan dari kompetensi dasar pendidikan umum yang harus dikembangkan pada diri setiap manusia. Manusia yang utuh berdasarkan enam bidang makna yang diketengahkan oleh Phenix, haruslah memiliki keterampilan dalam menggunakan simbol-simbol, ujaran, dan isyarat, dapat menciptakan dan mengapresiasi objek-objek estetik yang bermakna, diberkahi dengan kekayaan dan disiplin kehidupan dalam kaitannya dengan dirinya serta orang lain, dapat mengambil keputusan secara bijaksana dan mempertimbangkan kebenaran serta kesalahan dan memiliki suatu pandangan yang integral (Phenix, 1964 : 8).
6. Tujuan utama dari pendidikan umum dapat diarahkan untuk membebaskan manusia dari keterbelakangan dan kebodohan, yakni dengan membekali pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan peserta didik agar dapat menjalani hidup di masyarakat. Selain itu, yang

tidak dapat diabaikan adalah mempertebal keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, memberikan bekal pengetahuan yang luas dan menyeluruh, membangkitkan kesadaran nasional yang tinggi, membina moral yang berazaskan Pancasila, memupuk tanggung jawab selaku individu, anggota keluarga, warga masyarakat, dan warga negara.

7. Indikator pencapaian tujuan pendidikan umum yang merujuk pada pembentukan manusia utuh. Dalam konteks pendidikan secara luas, tujuan pendidikan umum dapat dikatakan tercapai apabila output yang dihasilkannya memiliki indikator karakteristik yang dijabarkan dari dimensi manusia utuh yang dimaksudkan dalam tujuan pendidikan nasional.
8. Penelitian ini, tidak semua indikator tersebut dijadikan sebagai tolok ukur untuk menentukan kaitan antara upaya pembinaan nilai keagamaan dengan pencapaian tujuan pendidikan umum. Hanya aspek tertentu yang diapandang erat hubungannya, yang diajdikan indikator terbatas, yaitu indikator budi pekerti, kemandirian dan tanggung jawab sosial.
9. Penyusunan program pembinaan meliputi aspek-aspek sebagai berikut: Tujuan kegiatan, target kegiatan, Pelaksanaan kegiatan (petugas), Peserta kegiatan (warga binaan pemasyarakatan), Jenis kegiatan, Sarana

dan biaya, Jangka waktu dan skedul kegiatan, Monitoring dan Evaluasi.

10. Faktor yang menyangkut warga binaan pemasyarakatan yang perlu diperhatikan: Jenis perkara, jenis pidana, Lamanya masa pidana, Jenis kelamin, Usia, Agama, Suku bangsa, Kondisi fisik dan Psikologis, Residivis atau bukan, Latar belakang pribadi; Pendidikan, Status keluarga, Tingkat sosial, Status sosial.
11. Metode pembinaan atau bimbingan yang diterapkan di lembaga pemasyarakatan I Cirebon, meliputi: a. pembinaan berupa interaksi langsung yang sifatnya kekeluargaan antara pembina dengan yang dibina (warga binaan pemasyarakatan); b. Pembinaan bersifat persuasif, edukatif yaitu berusaha merubah tingkah lakunya melalui keteladanan dan memperlakukan adil diantara sesama mereka sehingga menggugah hatinya untuk melakukan hal-hal yang terpuji, menempatkan warga binaan pemasyarakatan sebagai manusia yang memiliki potensi dan memiliki harga diri dengan hak-hak dan kewajibannya yang sama dengan manusia lainnya; c. Pembinaan berencana, terus menerus dan sistematis; d. Pemeliharaan dan peningkatan langkah-langkah keamanan yang disesuaikan dengan tingkat keadaan yang dihadapi pada saat itu; e. Pendekatan individual dan kelompok; f. Dalam rangka menumbuhkan rasa kesungguhan, keikhlasan dan tanggung

- jawab dalam melaksanakan tugas serta menanamkan kesetiaan, ketaatan, dan keteladanan di dalam pengabdian-nya terhadap negara, hukum dan masyarakat, para petugas dalam jajaran masyarakatan perlu memiliki kode perilaku dan dirumuskan dalam bantuan ETOS KERJA.
12. Paradigma kurikulum pendidikan umum, dengan merujuk pada Pancasila dan Undang-undang dasar 1945 yang secara lebih khusus dituangkan dalam UUSPN 1989, setidaknya perlu mempertimbangkan keterkaitan antara tujuan, aspek-aspek yang hendak diprioritaskan untuk dicapai melalui pendidikan umum, metode yang digunakan, peserta didik, dan evaluasinya.
13. 4 macam pembinaan, yaitu: a. **Pembinaan Mental**, yaitu:
- 1) Memberikan pengertian untuk dapat menerima dan menanggapi rasa frustrasi dengan wajar, 2) Memperlihatkan perhatian dan keinginan membantu, 3) Merangsang dan menggugah semangat narapidana untuk mengembangkan daya cipta, rasa dan karsanya, 4) Memberikan kepercayaan kepada kesanggipan narapidana dan menanamkan rasa percaya diri sendiri serta terhadap lingkungannya untuk menghilangkan rasa cemas dan gelisah dengan menekankan pentingnya agama dalam mencapai kesenangan batin dengan melalui ceramah-ceramah agama, beribadah sesuai dengan kepercayaannya, membaca dan mempelajari tafsir Al-Qur'an, ibadah bersama.
- b. **Pembinaan Sosial**

(Kemasyarakatan), dan c. Pembinaan Keterampilan.

14. Hambatan dalam pelaksanaan pemasyarakatan. Hambatan-hambatan tersebut secara garis besarnya adalah: a. Peraturan Perundang-undangan, b. Personil, c. Administrasi Keuangan, d. Sarana Fisik.
15. Pola hidup mandiri narapidana kecenderungan mengacu kepada nilai-nilai ajaran Islam sebagai berikut; Tauhidullah (mengesakan Allah dalam berit'ikad ucapan dan perbuatan yakni menomorsatukan Allah diatas segala-galanya), Amilussolihat (Melakukan amal soleh dalam kehidupannya), Musaawah (melakukan derajat manusia, ia memandang bahwa manusia mempunyai derajat yang sama disisi Allah), Ukhuwah Islamiah (persaudaraan Islam, memandang/memperlakukan orang Islam lainnya seperti kepada saudara kandung sendiri), Ta'awun (sikap kompetitif dalam kebaikan), Takafulul Ijtima (memiliki sikap tanggung jawab sosial yang tinggi), Tasamuh (memiliki sikap tanggung jawab susila yang tinggi), Istiqomah (kuat mempertahankan prinsip-prinsip yang benar), Tawakal (sikap menerima terhadap hasil usaha yang maksimal), Ijtihad (sungguh-sungguh dalam menggalikan ajaran Islam), Jihad (sungguh-sungguh dalam memperjuangkan dan mempertahankan ajaran Islam), Ikhlas (tanpa pamrih dalam melaksanakan amal kecuali menharap ridho Allah).

16. Adanya kecenderungan bahwa kasus (KN:1,2,3,4, dan 5), menunjukkan profil sikap dan perilaku atau pola hidup mandiri yang mengacu kepada unsur-unsur sikap dan perilaku: bertanggung jawab, hak dan kewenangan orang lain tidak dijadikan fasilitas dirinya, mampu memenuhi kebutuhan pokok minimal, mempunyai etos kerja yang baik, berdisiplin dan berani mengambil resiko atas segala perbuatan yang dilakukannya.
17. Profil sikap perilaku atau pola hidup mandiri ini terungkap dalam aktivitas yang menyangkut kegiatan dalam hubungannya dengan; pelaksanaan tugas dari lembaga pemasyarakatan, dalam berhubungan dengan pimpinan, staf, maupun pembina, dalam pergaulan dengan sesama narapidana, dalam mengerjakan tugas-tugas pribadi, serta dalam melaksanakan ibadah.
18. Pola Pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Cirebon, meliputi: a. Pembinaan Kepribadian, yang terdiri dari; 1) Pembinaan kesadaran beragama, 2) Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, 3) Pembinaan kemampuan intelektual, 4) Pembinaan kesadaran hukum, 5) Pembinaan sosial. b. Pembinaan Kemandirian, yang terdiri dari; 1) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri (kerajinan tangan), 2) Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya, 3) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri, 4)

Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau pertanian yang menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi.

19. Agama Islam adalah risalah (pesan-pesan) yang diturunkan Tuhan kepada para nabi dan rasul sebagai petunjuk dan pedoman yang mengandung hukum-hukum sempurna untuk dipergunakan dalam menyelenggarakan tata cara kehidupan manusia, yaitu mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, hubungan manusia dengan alam dan hubungan manusia dengan Khaliknya. Sebagai sumber nilai, Agama Islam memberikan petunjuk, pedoman dan pendorong bagi manusia dalam menciptakan dan mengembangkan budaya serta memberikan pemecahan terhadap segala persoalan hidup dan kehidupan. Di dalamnya mengandung ketentuan-ketentuan keimanan, ibadah, mu'amalah, dan pola tingkah laku dalam berhubungan dengan sesama makhluk yang menentukan proses berpikir, merasa dan pembentukan kata hati.
20. Agama Islam itu membawa peraturan-peraturan Allah bagi manusia, bukan hanya sebatas melaksanakan kebajikan dan menjauhi kemungkaran dalam arti tekstual, akan tetapi harus mengajak orang lain untuk berbuat kebajikan dan menjauhi kemungkaran.
21. Dengan memegang teguh ajaran Islam manusia akan memiliki kualitas sikap yang terpuji sebagai identitas

- keislamannya dan dapat terlihat dari perilaku sehari-hari baik dalam hubungannya dengan sesama umat Islam maupun dalam hubungannya dengan orang-orang nonmuslim.
22. Manusia mandiri adalah manusia yang memiliki keunggulan dalam kemampuan, berkepribadian sehat dan bermoral kuat. Manusia unggul adalah manusia yang memiliki kemampuan tertentu, yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupannya, baik dalam kehidupan pribadi, sosial, maupun dalam karir atau pekerjaan. Keunggulan tidak berarti harus unggul dalam segala hal, dan mengungguli semua orang, tetapi unggul (excellent) dalam satu bidang tertentu dan pada tingkat tertentu.
23. Kemandirian merupakan salah satu ciri dari kedewasaan. Orang yang mandiri memiliki kemauan dan kemampuan usaha untuk memenuhi tuntutan kebutuhan hidupnya secara sah, wajar dan bertanggung jawab. Namun ini tidak berarti bahwa orang yang mandiri itu lepas dari bantuan orang lain. Orang yang mandiripun tidak identik dengan orang yang memiliki sikap individualistik. Orang yang mandiri adalah orang yang hidup ditengah-tengah masyarakat sekitarnya, namun memiliki tanggung jawab untuk memenuhi tuntutan kebutuhan hidupnya secara wajar. Karena itu mandiri mempunyai makna tanggung jawab, tidak menyita hak-hak orang lain, mampu memenuhi tuntutan kebutuhan pokok minimalnya,

punya keberanian mengambil resiko.

24. Yang menjadi rintangan bagi kami untuk melaksanakan sistem kepenjaraan ini ialah warisan yang kami dapat dari jaman lampau, yang merupakan mirus besar. Rumah-rumah penjara yang keadaannya menyedihkan yang sulit untuk disesuaikan dengan tugas pemasyarakatan yang letaknya ditengah-tengah kota.

## B. Saran-saran

### 1. Untuk Departemen Kehakiman

- a. Pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan merupakan masalah kompleks yang memerlukan penanganan secara antar departemental. Disarankan agar keterlibatan pihak-pihak yang terkait dengan pembinaan narapidana supaya dapat dipadukan dengan baik. Artinya dalam hal yang sifatnya teknis, departemen kehakiman bisa meminta bantuan kepada instansi yang lebih berkopentent.
- b. Dilihat dari aspek keilmuan, penanganan masalah pembinaan di lembaga pemasyarakatan menuntut adanya interdisipliner. Untuk itu disarankan agar dalam pengangkatan pegawai untuk di lembaga pemasyarakatan supaya memperhatikan latar belakang pendidikan yang bervariasi.

- c. Dipandang sudah saatnya pihak departemen kehakiman mengutamakan kebijakannya kepada riset yang komprehensif dan terpadu dalam rangka mengkaji permasalahan dalam lembaga pemasyarakatan. Untuk itu keterlibatan perguruan tinggi dari berbagai disiplin ilmu, termasuk pendidikan sangat mendesak untuk segera direalisasikan.

## 2. Untuk Lembaga Pemasyarakatan I Cirebon

- a. Masalah pembinaan narapidana menuntut upaya yang khusus dan penekunan keahlian. Untuk itu disarankan agar pihak lembaga membuka diri untuk mendapat bantuan dari berbagai pihak, terutama perguruan tinggi.
- b. Disarankan agar orientasi program, tidak hanya ke dalam. Tetapi mulai memikirkan masalah-masalah narapidana yang berkaitan dengan masyarakat. Untuk itu upaya intervensi terhadap masyarakat dalam membantu pelaksanaan pembinaan perlu diutamakan.
- c. Perlu adanya program yang menekankan kepada tindak lanjut, yaitu setelah para narapidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, walaupun dalam pelaksanaannya dengan cara lintas sektoral. tetapi program pembinaan menjadi satu alur dengan program lembaga.

### 3. Untuk Para Ahli Pendidikan

- a. Ternyata fenomena pendidikan tidak hanya terkonsentrasi di persekolahan. Pendidikan di lembaga masyarakat cukup memberi bukti, adanya lapangan pendidikan yang bersifat umum dan luas. Untuk itu, disarankan kepada para pemerhati dan ilmuwan pendidikan, untuk lebih berupaya memfokuskan perhatiannya kepada dunia pendidikan yang lebih umum.
- b. Secara konsep, pendidikan dalam lembaga masyarakat dihadapkan pada suatu dimensi yang sangat luas, namun bersifat khas. Hal ini mengingat sasaran didiknya memiliki karakteristik khusus. Untuk itu perlu dipikirkan baik secara konseptual maupun dalam bentuk suatu model pendidikan yang diperuntukan bagi sasaran yang khas tersebut.
- c. Perlu dipikirkan tenaga pendidikan yang mulai berorientasi kepada pendidikan yang bersifat umum, yang secara profesional mereka dapat mengisi lembaga-lembaga seperti lembaga masyarakat atau balai latihan dan lainnya, yang lebih adaptif. Dan tenaga tersebut menjadi kepentingan nasional.

### C. Rekomendasi Penelitian

1. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, disadari karena penelitian bersifat kasus, maka disarankan untuk melakukan penelitian yang bersifat uji hipotesis dan bahkan eksperimen, dalam permasalahan yang sama.
2. Dari segi aspek dan fokus kajian penelitian, dirasakan bahwa keterbatasan penelitian ini demikian sempit. Untuk itu diajukan rekomendasi untuk penelitian yang berdimensi variabel cukup luas dan tidak bersifat kasuistik. Bahkan memperhitungkan variabel determinan lainnya di luar sistem lembaga.
3. Dari segi keluasan wilayah penelitian, tampak bahwa penelitian hanya dipusatkan di lembaga pemasyarakatan I Cirebon, padahal dilihat dari kewilayahan maupun jenis lembaga pemasyarakatan demikian luas. Untuk itu direkomendasikan untuk adanya penelitian lebih lanjut dalam fokus kewilayahan dan jenis lembaga yang lebih luas (Jawa Barat atau Indonesia).